

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PREPOSISI

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni:

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat;
2. Terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual;
3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan;
4. terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

(Muhadjir, 1993:15)

Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan merupakan langkah atau tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Tujuan utama kebijakan adalah untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan harus memperhatikan empat hal penting berikut:

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat: Kebijakan harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti

menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

2. Terjadi keadilan: Kebijakan harus memastikan terciptanya keadilan dalam masyarakat. Ini mencakup penerapan hukum yang adil, memperjuangkan keadilan sosial, serta memberikan peluang yang sama bagi individu untuk mencapai prestasi dan kreativitas mereka.

3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat: Kebijakan harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembahasan, perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih efektif.

4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan: Kebijakan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Ini berarti kebijakan harus mampu menjaga dan mempertahankan sumber daya alam, lingkungan, dan faktor-faktor lain yang penting bagi perkembangan jangka panjang masyarakat.

Dengan memperhatikan empat hal penting ini, kebijakan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan, menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "*Polis*" yang artinya kota (*city*). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara

bertindak, pernyataan citacita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat bebas atau suatu larangan (misalnya suatu hukum yang mewajibkan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut James E. Anderson mendefinisikan kebijakan itu adalah sebagai berikut.

“Serangkaian landasan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.” (Islamy, 2000)

Kebijakan merujuk pada serangkaian landasan atau aturan yang dibuat dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh individu atau sekelompok pelaku dalam upaya memecahkan suatu masalah spesifik. Kebijakan dapat berupa instruksi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah atau organisasi, yang bertujuan

untuk mengatur tindakan atau keputusan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks ini, kebijakan diterapkan sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Hal ini melibatkan identifikasi masalah, pembuatan rencana dan langkah-langkah yang spesifik, serta pelaksanaan kebijakan tersebut oleh individu atau sekelompok pelaku yang terlibat. Tujuan dari kebijakan adalah untuk memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebijakan dapat berkaitan dengan berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, atau bidang lainnya, tergantung pada konteks dan sifat masalah yang ingin diselesaikan.

Kebijakan juga merujuk kepada aktor kebijakan untuk pengawasan sistem dan prosedur dilingkungan kebijakan yang melatar belakangi adanya masalah mengenai pengawasan. “Aktor kebijakan telah memasukan perumusan masalah tersebut ke agenda kebijakan, setelah di analisis maka kebijakan tersebut disusun menjadi suatu kebijakan yang siap untuk di implementasikan. Kebijakan pengawasan mencakup keseluruhan proses pembangunan mulai aspek kebijakan, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fisik di lapangan, sampai dengan penilaian terhadap manfaat suatu program kegiatan secara obyektif dan proporsional sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas secara tertib, efisien dan efektif.” (Kurniasih, 2013)

Peran aktor kebijakan dalam proses perumusan, penyusunan, dan implementasi kebijakan. Pertama, aktor kebijakan memasukkan masalah tertentu ke dalam agenda kebijakan, yang berarti masalah tersebut diakui sebagai isu penting yang membutuhkan perhatian dan tindakan.

Kemudian, masalah tersebut dianalisis secara mendalam untuk memahami akar permasalahan dan implikasi kebijakan yang mungkin. Setelah analisis selesai, kebijakan dirancang dan disusun agar dapat diimplementasikan. Hal ini mencakup perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk menangani masalah tersebut.

Selanjutnya, kebijakan pengawasan menjadi penting dalam memastikan keseluruhan proses pembangunan berjalan dengan baik. Pengawasan mencakup aspek kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan fisik di lapangan, dan penilaian terhadap manfaat program kegiatan secara obyektif dan proporsional.

Tujuan dari kebijakan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan dengan tertib, efisien, dan efektif. Dengan melakukan pengawasan yang baik, diharapkan kebijakan yang telah disusun dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas yang baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

### 2.1.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan mencakup substansi, implementasi dan dampak, dalam hal ini evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Menurut William N. Dunn dalam buku *Public Policy Analysis* diterjemahkan oleh Samodra Wibawa menjadi buku *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* :

“Aspek-aspek kinerja kebijakan yang harus dievaluasi sebagaimana yang tampak sebagai berikut:

- a. Efektifitas tercapainya hasil yang diinginkan;
- b. Efisiensi upaya demi tercapainya hasil yang diinginkan;
- c. Kecukupan pencapaian hasil yang diinginkan;
- d. Pemerataan manfaat yang didistribusikan untuk hasil yang diinginkan;
- e. Responsivitas pemuasan hasil kebijakan yang diinginkan;
- f. Ketepatan tujuan hasil yang diinginkan.”

(Samodra Wibawa, 2003 : 610)

Teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn yang dipilih oleh peneliti ini karena masih relevan digunakan di masa sekarang dalam aspek-aspek kinerja kebijakan yang harus dievaluasi.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Secara spesifik William Dunn mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu tujuan, asumsi, dan bentuk-bentuk utamanya. (Wibawa, 2003)

Teori "Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan" mengacu pada pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik. Secara khusus, William Dunn mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu tujuan, asumsi, dan bentuk-bentuk utamanya.

Pendekatan evaluasi tujuan berkaitan dengan penilaian sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai. Evaluasi ini dilakukan sebelum kebijakan dilaksanakan dan bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai setelah implementasi.

Pendekatan evaluasi asumsi melibatkan penilaian terhadap asumsi-asumsi yang mendasari kebijakan. Evaluasi ini dilakukan selama implementasi kebijakan dan bertujuan untuk mengidentifikasi apakah asumsi-asumsi tersebut masih relevan dan valid dalam konteks implementasi yang sebenarnya.

Pendekatan evaluasi bentuk-bentuk utama berfokus pada bentuk implementasi kebijakan secara langsung. Evaluasi ini dilakukan setelah kebijakan dilaksanakan dan berupaya untuk mengidentifikasi apakah kebijakan telah diimplementasikan sesuai dengan rencana awal, prosedur yang ditetapkan, dan langkah-langkah yang telah disusun.

Dengan menggunakan tiga pendekatan evaluasi ini, evaluasi implementasi kebijakan dapat memberikan pemahaman yang lebih



komprehensif tentang sejauh mana kebijakan berhasil diterapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebagai perbandingan, James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi:

1. Evaluasi Proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi;
2. Evaluasi Impak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan / atau pengaruh dari implementasi kebijakan;
3. Evaluasi Kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki, dan
4. Evaluasi Meta-evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan- kesamaan tertentu.

(Nugroho, 2009 : 674)

Evaluasi Proses berfokus pada proses implementasi kebijakan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana kebijakan telah diimplementasikan dengan benar dan efisien. Evaluasi ini akan memperhatikan aspek-aspek seperti perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Evaluasi proses ini memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan, serta memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan dan peningkatan di masa depan.

Evaluasi Impak ini berkaitan dengan hasil dan pengaruh yang dihasilkan dari implementasi kebijakan. Fokus evaluasi ini adalah untuk mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat, ekonomi, lingkungan, atau kelompok sasaran yang dituju. Evaluasi impak

mengidentifikasi apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah ada efek samping yang tidak diinginkan. Evaluasi ini membantu dalam penilaian efektivitas kebijakan dan memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan terkait penyesuaian kebijakan di masa depan.

Evaluasi Kebijakan ini bertujuan untuk menilai apakah hasil yang dicapai dari implementasi kebijakan mencerminkan tujuan yang dikehendaki. Evaluasi ini melibatkan penilaian apakah kebijakan tersebut berhasil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, apakah tujuan tersebut relevan dan realistis, serta apakah ada alternatif kebijakan yang lebih baik. Evaluasi kebijakan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang apakah kebijakan tersebut efektif dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.

Evaluasi Meta-evaluasi ini berkaitan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu. Meta-evaluasi mengumpulkan data dan temuan dari evaluasi-evaluasi yang dilakukan pada kebijakan serupa dalam konteks yang berbeda. Tujuan meta-evaluasi adalah untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan dalam implementasi kebijakan serta mengambil pembelajaran yang dapat diterapkan secara lebih luas. Evaluasi ini membantu dalam memahami faktor-faktor kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan membuka peluang untuk peningkatan dan inovasi kebijakan di masa depan.

Pengelompokan ini membantu dalam memahami dimensi yang berbeda dari evaluasi implementasi kebijakan. Setiap jenis evaluasi memiliki tujuan dan fokusnya sendiri, namun secara keseluruhan memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang efektivitas, dampak, dan keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan.

Menurut Husein Umar evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Berikut penjelasan salah satu tahapan evaluasi yang umumnya digunakan :

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi  
Dalam dunia bisnis, apa saja yang dapat dievaluasi, mengacu pada program kerja perusahaan. Dalam program kerja perusahaan banyak terdapat aspek-aspek yang dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi biasanya yang di prioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi factor kunci suksesnya.
2. Merancang (desain) kegiatan evaluasi  
Sebelum evaluasi dilakukan, sebaiknya ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
3. Pengumpulan data  
Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
4. Pengolahan dan analisis data  
Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan sesuai dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
5. Pelaporan hasil evaluasi  
Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis dan diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan.
6. Tindak lanjut evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen. Oleh karena itu, hasil evaluasi hendaknya dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi masalah manajemen baik di tingkat strategi maupun di tingkat implementasi strategi.  
(Umar, 2005 : 78)

Evaluasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen. Oleh karena itu, hasil evaluasi hendaknya dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi masalah manajemen baik di tingkat strategi maupun di tingkat implementasi strategi.

Tahapan evaluasi yang umumnya digunakan melibatkan beberapa langkah yang penting dalam melakukan evaluasi dalam konteks dunia bisnis. Pertama, tahap penentuan apa yang akan dievaluasi sangat penting karena aspek-aspek yang menjadi faktor kunci kesuksesan perusahaan perlu dievaluasi. Setelah itu, tahap merancang desain evaluasi membantu memastikan bahwa desain evaluasi telah dipersiapkan dengan baik, termasuk menentukan data yang dibutuhkan, tahapan kerja yang akan dilalui, serta orang-orang yang terlibat dalam evaluasi.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada. Setelah data terkumpul, tahap pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai untuk menghasilkan fakta-fakta yang dapat dipercaya. Data tersebut kemudian dibandingkan

dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan atau gap.

Pelaporan hasil evaluasi menjadi penting agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan dokumentasi tertulis serta informasi lisan yang jelas diperlukan. Terakhir, hasil evaluasi hendaknya dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan yang dapat mengatasi masalah manajemen baik di tingkat strategi maupun implementasi strategi. Evaluasi ini merupakan bagian penting dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan secara keseluruhan.

### **2.1.3 *Smart City***

*Smart City* atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

Menurut Rudolf Griffinger ada enam indikator *Smart City* yang perlu mendapat perhatian khusus, antara lain:

- a.) *Smart Government* yaitu Pemerintah adalah salah satu pemangku kepentingan terpenting dari *Smart City*. Kehadiran pemerintah harus mampu mendukung perubahan dan pembangunan sosial secara efektif.
- b.) *Smart Mobility* yaitu peningkatan kualitas transportasi yang

disesuaikan dengan permasalahan transportasi di setiap kota.

c.) *Smart Economy* yaitu dengan membuka peluang usaha baru memanfaatkan teknologi digital yang sudah berkembang pesat di zaman ini.

d.) *Smart Environment* yaitu upaya meningkatkan kualitas lingkungan.

e.) *Smart People* yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas.

f.) *Smart Living* yaitu dukungan oleh kebijakan serta infrastruktur dari mobilitas, lingkungan, ekonomi, dan pemerintahan yang juga cerdas sehingga terciptanya kualitas hidup yang cerdas bagi masyarakat.

(Rudolf Giffinger, 2007 : 11)

Menurut Rudolf Griffinger, konsep *Smart City* memiliki enam indikator penting yang perlu diberikan perhatian khusus. Pertama, *Smart Government* mengakui peran vital pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam mewujudkan *Smart City*. Kehadiran pemerintah yang efektif diperlukan untuk mendukung perubahan dan pembangunan sosial secara efektif. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang progresif dan solutif.

Indikator selanjutnya, *Smart Mobility* fokus pada peningkatan kualitas transportasi yang disesuaikan dengan tantangan transportasi di setiap kota. Hal ini mencakup pengembangan sistem transportasi yang efisien, berkelanjutan, dan terjangkau, serta penggunaan teknologi yang mempermudah mobilitas masyarakat.

*Smart Economy* melibatkan pemanfaatan teknologi digital yang pesat dalam membuka peluang usaha baru. Dalam era yang serba terhubung ini, teknologi digital menjadi kunci dalam mendorong inovasi, pengembangan ekonomi kreatif, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Indikator berikutnya, *Smart Environment*, menekankan pentingnya

upaya meningkatkan kualitas lingkungan. Dalam konteks *Smart City*, ini melibatkan penggunaan energi yang efisien, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan pelestarian sumber daya alam untuk mencapai keseimbangan lingkungan yang sehat.

*Smart People* mengacu pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas. Pendidikan, pelatihan, dan akses informasi yang memadai harus disediakan untuk memastikan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital.

Terakhir, *Smart Living* melibatkan dukungan oleh kebijakan serta infrastruktur cerdas dalam mobilitas, lingkungan, ekonomi, dan pemerintahan. Tujuannya adalah menciptakan kualitas hidup yang cerdas bagi masyarakat, di mana teknologi dan inovasi diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Dengan memperhatikan keenam indikator tersebut, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk mencapai visi *Smart City*. Implementasi strategi yang holistik dan berkelanjutan dalam membangun infrastruktur digital, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat akan membantu menciptakan kota yang cerdas, berkelanjutan, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.

Secara keseluruhan, keenam indikator tersebut merangkum aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan dan

implementasi konsep *Smart City*. Dalam mencapai *Smart City* yang sukses, penting untuk mengintegrasikan teknologi, pemerintahan yang efektif, partisipasi.

*Smart City* atau kota pintar adalah gagasan tentang komunitas yang membantu orang-orang yang tinggal di sana dengan mengelola sumber daya yang tersedia dan efisien dan menyediakan orang / lembaga di dalamnya informasi yang tepat untuk melakukan kegiatan atau untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga tersebut. (Supangkat, 2015)

Teori "*Smart City*" atau "kota pintar" adalah konsep pengembangan kota yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penggunaan teknologi dan manajemen sumber daya yang efisien. Dalam konsep ini, kota menggunakan berbagai solusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data dari berbagai sumber seperti infrastruktur fisik, perangkat sensor, dan perangkat terhubung lainnya.

Tujuan utama dari konsep *Smart City* adalah untuk menyediakan warga kota dengan akses mudah ke informasi yang relevan dan akurat, yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Informasi ini bisa berkisar dari lalu lintas, transportasi, keamanan, ketersediaan layanan publik, hingga kondisi lingkungan.



Dengan penggunaan teknologi dan infrastruktur yang cerdas, *Smart City* juga berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan lahan. Misalnya, dengan memantau konsumsi energi secara *real-time*, kota pintar dapat mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak efisien dan memberikan informasi kepada warga kota untuk mengubah perilaku mereka agar lebih hemat energi.

Selain itu, konsep *Smart City* juga melibatkan partisipasi aktif dari warga kota, lembaga pemerintah, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kota. Melalui platform partisipatif dan terbuka, masyarakat dapat memberikan masukan, melaporkan masalah, dan berinteraksi dengan pemerintah dan lembaga lainnya, sehingga menciptakan iklim kolaboratif dalam pengembangan kota.

*Smart City* dilihat sebagai cara untuk mencapai keberlanjutan, efisiensi, dan kemudahan hidup bagi penduduknya. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, manajemen sumber daya yang cerdas, dan partisipasi masyarakat, kota pintar bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain itu “*Smart city* merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah

sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya.” (Pratama, 2014 : 93)

Dalam konteks ini, smart city melibatkan penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan kota, seperti transportasi, infrastruktur, lingkungan, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi dalam pengelolaan kota.

Implementasi teknologi dalam smart city melibatkan berbagai sistem yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, penggunaan sensor dan perangkat Internet of Things (IoT) untuk mengumpulkan dan menganalisis data, penggunaan sistem cerdas untuk mengatur lalu lintas, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik, dan sebagainya. Semua sistem ini bekerja secara terintegrasi untuk menciptakan kota yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berkualitas bagi penduduknya.

Dengan adanya konsep smart city, diharapkan bahwa penggunaan teknologi yang cerdas dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mengurangi dampak lingkungan negatif, meningkatkan mobilitas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi smart city tidak hanya terkait dengan teknologi semata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, interaksi dan

koordinasi antara berbagai sistem dan pemangku kepentingan di dalam kota juga merupakan hal yang penting dalam pengembangan smart city.

Hal serupa juga disebutkan bahwa “smart city adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT, yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni.” (Muliarto, 2015)

Smart city adalah konsep yang menggabungkan infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi dalam suatu kawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Tujuan dari konsep ini adalah untuk menciptakan kota yang lebih efisien, berkelanjutan, dan nyaman bagi penduduknya. Dengan mengintegrasikan semua elemen infrastruktur, seperti transportasi, energi, keamanan, layanan publik, dan partisipasi masyarakat, smart city dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Dalam smart city, teknologi ICT menjadi tulang punggung yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan kota. Misalnya, sensor-sensor yang terpasang di berbagai titik kota dapat mengumpulkan data secara real-time tentang kondisi lalu lintas, kualitas udara, tingkat kebisingan, dan lain sebagainya. Data ini kemudian dapat dianalisis dan dimanfaatkan untuk mengambil keputusan yang cerdas dalam mengelola kota, seperti

mengoptimalkan rute transportasi, mengatur pencahayaan jalan yang efisien, atau mengelola limbah dengan lebih baik.

Selain itu, smart city juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik. Melalui aplikasi mobile atau platform online, penduduk dapat memberikan masukan, melaporkan permasalahan, dan berinteraksi dengan pemerintah atau instansi terkait. Hal ini memungkinkan adanya keterlibatan yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih responsif.

Dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi ICT dan mengintegrasikan berbagai infrastruktur, smart city bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang efisien, berkelanjutan, dan layak huni bagi penduduknya. Konsep ini menjadi jalan untuk menghadapi tantangan perkotaan, seperti kemacetan, polusi, dan keterbatasan sumber daya, dengan harapan menciptakan kota-kota yang lebih cerdas, inklusif, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik.

#### **2.1.4 Parkir**

Parkir atau perparkiran mengacu pada kegiatan menempatkan kendaraan pada suatu tempat tertentu untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan ketika seseorang berhenti atau meninggalkan kendaraannya di tempat tertentu, seperti area parkir di pinggir jalan, gedung parkir,

atau tempat parkir khusus lainnya. Parkir merupakan bagian penting dalam kehidupan perkotaan, karena diperlukan untuk mengatur dan mengatur lalu lintas kendaraan serta memberikan aksesibilitas yang baik bagi pengguna jalan.

Parkir dapat dilakukan oleh berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil, sepeda motor, sepeda, atau kendaraan umum seperti bus. Tujuan utama parkir adalah untuk memberikan tempat yang aman dan teratur bagi kendaraan agar tidak menghambat lalu lintas atau mengganggu area publik. Selain itu, parkir juga memfasilitasi kegiatan sehari-hari, seperti berbelanja, bekerja, atau mengunjungi tempat-tempat umum.

Ada beberapa jenis tempat parkir yang tersedia, mulai dari parkir di jalan, parkir di lahan kosong, hingga gedung parkir. Parkir di jalan umumnya merupakan tempat parkir di tepi jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan yang akan berhenti sementara waktu. Area parkir ini biasanya diatur oleh peraturan lalu lintas dan biasanya dikenakan biaya parkir.

Lahan kosong sering kali digunakan sebagai area parkir sementara, terutama di daerah yang tidak memiliki cukup fasilitas parkir permanen. Area ini biasanya diizinkan oleh pemilik tanah untuk sementara waktu atau selama jangka waktu tertentu sebagai tempat parkir kendaraan. Beberapa lahan kosong ini dapat ditemukan di sekitar pusat perbelanjaan, pusat kota, atau area yang sibuk lainnya.

Selain itu, gedung parkir adalah fasilitas parkir yang terstruktur dan sering kali memiliki beberapa lantai atau tingkat. Gedung parkir ini dapat ditemukan di pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, stasiun, atau tempat-tempat dengan kepadatan kendaraan yang tinggi. Gedung parkir biasanya dilengkapi dengan sistem manajemen parkir yang canggih, termasuk sistem pembayaran otomatis, sistem penghitungan kapasitas parkir, dan tanda-tanda yang jelas untuk memandu pengguna parkir.

Dalam beberapa kasus, pengaturan parkir diatur oleh pemerintah daerah atau otoritas transportasi. Mereka menetapkan aturan dan peraturan terkait tarif parkir, waktu parkir, atau jenis kendaraan yang diizinkan. Ini bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan mendorong efisiensi penggunaan ruang parkir.

Namun, parkir juga dapat menjadi permasalahan dalam konteks perkotaan yang padat penduduk. Keterbatasan ruang parkir, parkir liar yang tidak diizinkan, atau parkir yang tidak teratur dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, manajemen parkir yang efektif dan solusi inovatif seperti Terminal Parkir Elektronik (TPE) diadopsi untuk mengoptimalkan penggunaan ruang parkir dan meningkatkan pengalaman pengguna.

### 2.1.5 Parkir Meter

Meteran parkir adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan uang dengan imbalan hak untuk memarkir kendaraan di tempat tertentu untuk waktu yang terbatas. Meteran parkir dapat digunakan oleh pemerintah kota sebagai alat untuk menegakkan kebijakan parkir di badan jalan terpadu mereka, biasanya terkait dengan kebijakan manajemen lalu lintas dan mobilitas mereka, tetapi juga digunakan untuk pendapatan.

Kota Bandung telah memasang sebanyak 445 mesin parkir elektronik di 221 titik yang tersebar di wilayah Kota Bandung. Pola pembayarannya dengan menggunakan non tunai atau kartu pembayaran hasil kerjasama dengan sejumlah bank.

Langkah-langkah untuk menggunakan parkir meter yang pertama adalah memilih jenis kendaraan yang digunakan. Ada tiga pilihan, yaitu motor dengan tarif Rp 2.000 per jam, mobil Rp 5.000 per jam, dan bus atau truk Rp 8.000 per jam. Pilihan itu diambil dengan memencet tombol kuning di bawah layar. Setelah dipilih pencet tombol berwarna hijau. Selanjutnya, masukan nomor kendaraan, durasi parkir dan pencet tombol hijau untuk mengkonfirmasi. Mesin akan memberika perintah dari layar untuk menempelkan kartu pembayaran. Bukti pembayaran akan keluar dalam bentuk struk selebaran kertas yang keluar dari mesin parkir.

Namun, sejauh ini parkir meter elektronik ini pengoperasiannya belum terlalu efektif. Peralnya masih banyak warga yang belum memiliki

kartunya. Sehingga pola pembayarannya masih banyak melakukan manual.

### **2.1.6 Terminal Parkir Elektronik**

Terminal Parkir Elektronik Terminal Parkir Elektronik (TPE) adalah salah satu jenis *smart parking system* dengan memanfaatkan parking meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara *real time*.

Terminal Parkir Elektronik (TPE) ini merupakan sistem perparkiran elektronik untuk mewujudkan program. Program Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) merupakan program besar dalam peningkatan pelayanan publik yang lebih modern dan mendorong pendapatan asli daerah (PAD) melalui pendapatan daerah Parkir.

Sistem Terminal Parkir Elektronik. (TPE) ini merupakan sistem perparkiran elektronik untuk mewujudkan program. Program Sistem Terminal Parkir.



## 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menguraikan tentang Evaluasi Kebijakan *Smart City* Di Kota Bandung Studi Kasus Tentang Alat Parkir Meter Pada Terminal Parkir Elektronik, yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu konsep ukuran yang memberikan gambaran antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Adapun evaluasi kebijakan dapat diukur melalui beberapa aspek-aspek seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Artinya semakin tinggi hasil yang dicapai dari tujuan awal yang telah ditetapkan, maka semakin efektifnya suatu program. Sedangkan bila hasil yang dicapai jauh dari tujuan awal, maka program tersebut tidak efektif.

Ditinjau dari permasalahan diatas dapat diketahui bahwa dalam menilai evaluasi kebijakan perlu memerhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek efektivitas pada keberhasilan kebijakan *Smart City* di Kota Bandung tentang terminal parkir elektronik (TPE).
2. Aspek efisiensi pada indikator *Smart Mobility* dalam kebijakan *Smart City* di Kota Bandung tentang terminal parkir elektronik (TPE).
3. Aspek kecukupan pada kebijakan *Smart City* dalam program terminal parkir elektronik (TPE).
4. Aspek pemerataan pada kebijakan *Smart City* dalam program terminal parkir elektronik (TPE).

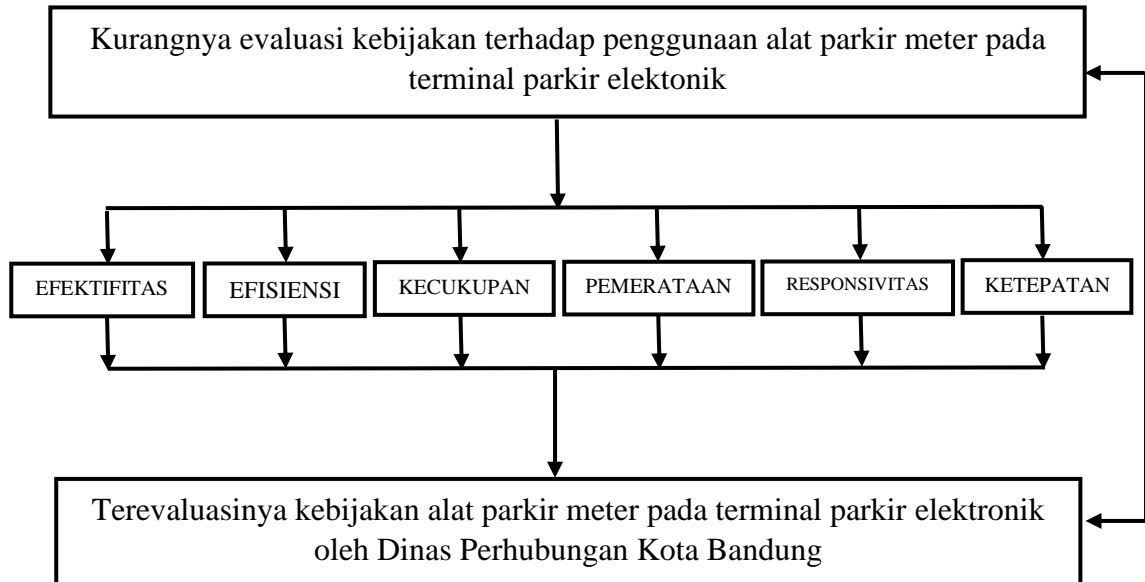
5. Aspek responsivitas dalam menjalankan kebijakan *Smart City* di Kota Bandung tentang terminal parkir elektronik (TPE).
6. Aspek ketepatan dalam meninjau lebih lanjut kebijakan selanjutnya dari Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan kebijakan *Smart City* di Kota Bandung tentang terminal parkir elektronik (TPE).

Permasalahan yang lain tentang evaluasi kebijakan *smart city* tentang TPE ini bahwasanya masyarakat Kota Bandung tersebut meski kotanya telah masuk ke dalam kategori *smart city* namun pada kenyataannya masih banyak masyarakatnya yang belum menjadi *smart people* akibat kurangnya informasi dan ketertinggalannya terhadap teknologi masih menjadi kendala dalam penggunaan konsep *smart mobility* pada *smart parking system* yang salah satunya adalah terminal parkir elektronik. Permasalahan ini diperjelas dengan mayoritas masyarakat yang tinggal di Kota Bandung tersebut bukan warga asli dan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung.

Maka dari itu dari berbagai teori diatas, dipilihlah teori William Dunn dikarenakan yang paling tepat dalam hal mengevaluasi pelaksanaan kebijakan *smart city* pada kasus terminal parkir elektronik (TPE).

Menurut William N. Dunn dalam buku *Public Policy Analysis* (Diterjemahkan oleh Samudro Wibawa menjadi buku *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 2003 : 610), aspek-aspek kinerja evaluasi kebijakan dalam pengimplementasiannya di ilustrasikan kedalam beberapa kategori.

**Gambar 2.1**  
**Model Kerangka Pemikiran**



### 2.3 Preposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disampaikan di atas, maka preposisi yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terevaluasinya kebijakan *smart city* tentang alat parkir meter pada terminal parkir elektronik di Kota Bandung ditentukan oleh aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.